Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1, 2025
e-ISSN: 2655-883

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBEKALAN CALON PENGANTIN SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PENCATATAN PRA NIKAH

Ahmad Makhrus Maulidin[1], Dzulfikar Rodafi[2], Syamsu Madyan[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012009@unisma.ac.id, [2]dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
[3]syamsu.madyan@unisma.ac.id

Abstract

The provision of prospective brides and grooms has a significant influence on the post-marriage life of couples, as the high divorce rate is partly due to the lack of readiness of couples for marriage. Therefore, this study aims to examine the effectiveness of providing prospective brides and grooms as a requirement for premarital registration at the KUA of Sukun District. As a means to assess the extent to which premarital provision helps prospective brides and grooms understand the responsibilities of marriage. The method used is descriptive qualitative with a juridical-empirical approach through interviews, observations, and documentation. The results of the study showed that the provision was carried out in a structured manner, covering materials on reproductive health, family communication, marriage law, and conflict prevention. This program is considered quite effective in increasing the understanding and mental readiness of prospective brides and grooms. This finding confirms the importance of premarital provision as an effort to form a harmonious family and support the policy of reducing the divorce rate.

Keywords: *Qualitative Descriptive, Premarital Debriefing, Marriage Administrative Requirements, Marriage Registration*

A. Pendahuluan

Angka perceraian di Indonesia semakin meninggi dan telah lama menjadi perhatian bagi pemerintah dan lembaga keagamaan. Sering diketahui penyebab dari perceraian di Indonesia bukan hanya sekedar persoalan ekonomi, namun terdapat juga persoalan akan rendahnya kesiapan mental dan pemahaman para pengantin mengenai peran, hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

Pembekalan pranikah merupakan salah satu usaha dari pemerintah dan lembaga agama untuk mempersiapkan pasangan agar dapat membangun keluarga yang sakinah. Namun, implementasi pembekalan pranikah ini masih menghadapi berbagai tantangan, dimulai dari kesadaran peserta yang rendah dan minim hingga keterbatasan sumber daya pelaksana.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai secara kritis seberapakah efektif pembekalan calon pengantin sebagai syarat kelengkapan

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sukun, sehingga dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dari pembekalan tersebut.

Penelitian ini berkaitan erat dengan karya Jufri (2021) yang menilai efektivitas bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di Kabupaten Sidrap, serta studi Suci Eliyawati (2022) yang menganalisis efektivitas kursus pranikah di Kecamatan Natar dari perspektif hukum Islam. Penelitian terdahulu banyak menekankan aspek konseptual dan hukum, sedangkan penelitian lebih menekankan pada pemetaan kendala dalam pelaksanaan pembekalan pranikah, serta evaluasi persepsi calon pengantin mengenai manfaat program tersebut sebagai upaya pencegahan konflik rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah kepada bimbingan pra nikah guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya mempertahankan pernikahan itu penting bagi keutuhan keluarga serta meminimalisir angka perceraian yang terdapat didaerah tersebut.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari catatan tertulis atau pengamatan langsung terhadap kejadian dan perilaku manusia yang terjadi di dunia nyata atau di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada data-data sehingga akan menjawab permasalahan yang akan di teliti dengan baik akurat dan mengenai pada pokok penelitian.

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam meneliti skripsi ini bertempat di KUA Kecamatan Sukun malang, Jawa Timur. Dengan alasan, peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena menurut peneliti itu sangat penting untuk dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi dari tempat objek penelitian. Dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. dan pengecekan keabsahan data digunakan sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Dengan kata lain apabila penulis melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, maka jelas bahwa hasil usaha penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari segala segi.

C. Hasil dan Pembahasan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah ditingkat kecamatan yang berada dibawah naungan kementrian agama. Tugas utama KUA meliputi pencatatan,pernikahan,perceraian dan rujuk, namun KUA juga mencangkup pelayanan terkait kelahiran (pencatatan nama anak), kematian, wakaf, dan zakat.

Pada tahun 1988, Kota Malang memperluas wilayahnya dengan menerima 12 desa dari Kabupaten Malang dan membagi diri menjadi lima kecamatan, dari sebelumnya tiga. Pemekaran ini menyebabkan empat kelurahan di Klojen bergabung dengan Sukun. Meskipun pelayanan administrasi Sukun telah berdiri sendiri, urusan hukum dan kantor KUA masih terpusat di Klojen. Baru pada tahun 1990, setelah memiliki landasan hukum yang kuat, KUA Sukun resmi berpisah dan menyewa kantor di Kebonsari. Pada tahun 1995, kantor KUA Sukun pindah lagi ke Sukun Gang II dengan status sewa. Setahun kemudian, KUA Sukun menerima dana proyek untuk membangun kantor permanen di atas lahan milik Pemerintah Kota Malang seluas 1000 m^2, berdekatan dengan kantor kecamatan, polsek, dan koramil. Gedung di Jalan Randu Jaya No. 2 ini masih digunakan hingga kini. Pada tahun 2010, KUA Sukun membangun tempat nikah yang juga berfungsi sebagai ruang arsip di depan kantor. Kemudian, pada tahun 2014, sebuah masjid bernama Mushollah As Sakinah dibangun di area belakang kantor secara swadaya. Selain itu, KUA Sukun bersama KUA se-Malang Raya aktif dalam digitalisasi data pernikahan melalui sistem informasi sejak 2007, yang kemudian mempermudah pelayanan publik dengan sistem cetak buku nikah.

Setelah peneliti menemukan beberapa data yang diharapkan, baik dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti akan menganalisis hasil temuan yang didapat. Adapun data-data yang diperoleh peneliti akan dipaparkan dan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yaitu: pertama, perencanaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukun terkait dengan calon pengantin. Kedua, Pelaksanaan pembekalan calon pengantin sebagai syarat kelengkapan persyaratan pencatatan pernikahan diKUA Sukun. Ketiga, kendala serta solusi untuk pembekalan calon pengantin yang dilakukan oleh Kua Kecamatan Sukun.

Disini peneliti selaku instrumen penelitian diharuskan mencari dan memilih data yang diperlukan.seluruh data yang terhimpun berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan disajikan oleh peneliti dalam bentuk deskriptif. Penelitian melakukan penjabaran hasil penelitian menjadi tiga bagian supaya data yang didapatkan dipaparkan secara terarah dan mendapatkan suatu gambaran kesimpulan yang jelas dari hasil penelitian,dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukun terkait dengan calon pengantin

Perencanaan yang dilakukan oleh KUA terkait calon pengantin adalah serangkaian tahapan yang dirancang untuk menjamin pernikahan sah secara

hukum dan agama, serta memberikan bekal bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah mawadah warohmah.

KUA sukun menerapkan beberapa upaya seperti yang pertama apabila kita melaksanakan akad nikah di KUA maka tidak ada pembayaran 1 rupiah pun, adapun kita harus melengkapi dokumen seperti foto copy kk, foto copy ktp,akte kelahiran, dan lain lain. Yang kedua apabila kita melaksanakan akad nikah diluar kantor KUA maka kita harus membayar biling sebesar Rp.600.000, adapun dokumen dokumen yang harus dilengkapi dokumen seperti foto copy kk, foto copy ktp, akte kelahiran, dan lain lain.

a. Prosedur dan persyaratan yang diajukan calon pengantin

Persyaratan umum yang diajukan oleh calon pengantin di KUA Sukun yaitu, surat pengantar dari ketua RT dan RW setempat. Ini adalah langkah awal yang menunjukkan bahwa anda adalah penduduk sah di lingkungan tersebut dan akan menjadi dasar untuk mendapatkan surat pengantar selanjutnya.

Surat pengantar dari lurah/kepala desa setelah mendapatkan surat dari RT/RW, catin perlu mengurus surat pengantar ke kantor kelurahan/desa. Surat ini menyatakan status kependudukan calon pengantin.

Mengisi dan menyerahkan bentuk nikah model N1 sampai N4. Formulir-formulir ini adalah dokumen resmi yang wajib diisi dan diserahkan ke KUA. Masing-masing formulir memiliki fungsi spesifik. Dalam proses pengajuan pernikahan di Indonesia, beberapa dokumen penting yang perlu disiapkan untuk memastikan kelancaran dan legalitasnya. Pertama adalah surat pengantar nikah N1 , yang merupakan bukti izin dari aparat desa/kelurahan dan kecamatan, berisi informasi dasar kedua calon pengantin. Selanjutnya, surat keterangan asal-usul mempelai N2 berfungsi menjelaskan riwayat hidup singkat calon pengantin, kemudian ada surat persetujuan mempelai N3 , sebuah formulir yang menegaskan bahwa kedua calon pengantin secara sadar dan bersedia menyetujui pernikahan mereka. surat keterangan orang tua N4 wajib diisi oleh orang tua/wali sebagai persetujuan mereka atas pernikahan anak, karena sangat penting jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun.

Dalam mempersiapkan administrasi pernikahan di KUA, kelengkapan dokumen menjadi prioritas utama. Calon pengantin wajib menyertakan fotokopi KTP mereka, termasuk KTP orang tua atau wali. Dokumen ini sangat penting untuk verifikasi data diri dan status kependudukan , sekaligus menegaskan persetujuan dan identitas wali nikah . Selain itu, fotokopi kartu keluarga calon pengantin juga diperlukan karena menunjukkan susunan keluarga dan status calon pengantin didalamnya. Terakhir fotokopi akta kelahiran calon pengantin,

akta ini adalah bukti sah yang membuktikan identitas dan tanggal lahir , sangat relevan untuk verifikasi usia pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pas foto ukuran 2x3 kira-kira 5 lembar untuk masing-masing calon pengantin. Pas foto ini akan digunakan untuk keperluan dokumen pernikahan, termasuk buku nikah. Pastikan latar belakang foto sesuai dengan ketentuan KUA umumnya biru atau merah.

Yang terakhir melakukan verifikasi dokumen oleh petugas KUA, petugas KUA akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan semua dokumen yang calon pengantin serahkan. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian, calon pengantin akan diminta untuk memperbaikinya.

Berdasarkan uraian diatas persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya dan hasil temuan dari wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa informan telah memperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai persyaratan calon pengantin. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kelengkapan dokumen administrasi seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran, hingga pentingnya pemeriksaan kesehatan serta partisipasi dalam bimbingan perkawinan. Perolehan pengetahuan ini menjadi penting bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan.

Perolehan pengetahuan tersebut secara langsung berkontribusi pada peningkatan efektivitas pembekalan calon pengantin di KUA Kecamatan Sukun. Dengan bekal informasi yang akurat dan lengkap, calon pengantin menjadi lebih siap dan teredukasi mengenai tahapan serta kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan. Efektivitas pembekalan ini juga terlihat dari minimalnya kendala administratif yang mungkin timbul, karena calon pengantin sudah memahami betul apa saja yang diperlukan dan mengapa persyaratan tersebut penting.

b. Catatan Biaya

Biaya pernikahan di kantor urusan agama diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama. Ada dua skema biaya utama :

1) Akad nikah di KUA pada hari dan jam kerja (gratis)
   Opsi ini adalah pilihan yang paling ekonomis. Jika anda memilih untuk melangsungkan akad nikah di dalam kantor KUA dan pada hari serta jam operasional operasional KUA. Umumnya Senin sampai Jumat, pukul 08.00-12.00 atau dhuhur, maka anda tidak akan dikenakan biaya sama sekali .

karena layanan ini dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik dasar oleh negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses untuk melangsungkan pernikahan secara sah tanpa hambatan biaya di lokasi resmi yang disediakan.

2) Akad nikah di luar KUA atau di luar jam kerja (berbayar)

Biaya ini berlaku jika anda memilih lokasi atau waktu di luar ketentuan gratis. Ada dua kondisi utama yang memicu biaya ini yaitu akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA. Akad nikah ini dilangsungkan di tempat lain selain kantor KUA, misalnya di rumah calon pengantin, di gedung pertemuan, di masjid, atau di lokasi resepsi pernikahan. Petugas KUA (Penghulu) akan datang ke lokasi tersebut.

Kemudian yang kedua akad nikah dilaksanakan di luar jam kerja, ini berarti akad nikah dilangsungkan pada hari atau jam di luar operasional KUA. Misalnya pada hari sabtu, minggu, hari libur nasional, atau setelah jam 16.00 pada hari kerja.

Besaran biaya untuk kedua kondisi di atas, biaya administrasi yang dikenakan adalah sebesar Rp 600.000 . Biaya ini merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) , yang berarti uang tersebut akan disetorkan langsung ke kas negara, bukan untuk pribadi penghulu atau KUA. biaya ini merupakan pengganti "transportasi" atau "upah lembur" bagi penghulu dan petugas KUA yang harus melayani di luar lokasi atau jam kerja normal. Ini juga mencakup biaya operasional tambahan yang mungkin timbul.(KUA Sukun, n.d.)

Berdasarkan uraian diatas persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya dan hasil temuan dari wawancara dengan kepala KUA, dapat disimpulkan bahwa peneliti telah memperoleh pengetahuan mengenai catatan biaya, yang pertama akad nikah di KUA pada hari dan jam kerja yang digratiskan, adalah wujud nyata dari pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Ini adalah sebuah penegasan bahwa pernikahan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang disediakan oleh negara. Dengan menghilangkan biaya pada opsi ini, pemerintah secara terus terang ingin menghapus hambatan finansial bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan ekonomi. Ini adalah bentuk empati, memastikan bahwa setiap pasangan, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka, dapat melaksanakan pernikahan tanpa perlu merasa tertekan oleh biaya. Ketersediaan layanan gratis ini menegaskan bahwa KUA berfungsi sebagai lembaga yang melayani

seluruh lapisan masyarakat, memberikan akses yang setara terhadap legalitas perkawinan

Pada akhirnya, pemahaman yang baik dari informan mengenai persyaratan calon pengantin berperan penting sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra-nikah di KUA Kecamatan Sukun. Persiapan ini tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga memberikan ketenangan bagi calon pengantin karena semua aspek hukum dan persiapan telah terpenuhi.

Bedasarkan dari paparan data yang didapat disimpulkan tentang perencanaan yang dilakukan di KUA Sukun yaitu dari Kepala KUA dan Penghulu sama-sama menekankan bahwa proses perencanaan pernikahan di KUA diawali dengan pengumpulan dan verifikasi dokumen persyaratan calon pengantin, termasuk identitas diri, surat keterangan sehat, dan dokumen khusus lainnya seperti surat izin memerintah bagi anggota TNI/Polri. Setelah dokumen lengkap calon pengantin menyerahkan dokumen asli ke KUA. Penghulu lebih spesifik menyoroti integrasi bimbingan pranikah sebagai tahapan wajib setelah kelengkapan dokumen dan sebelum akad nikah, serta pentingnya verifikasi wali nikah sebelum bimbingan dilaksanakan. Keduanya juga menyampaikan informasi mengenai biaya, dimana kalau melaksanakan akad nikah di kantor KUA gratis, namun dikenakan biaya Rp600.000 jika dilaksanakan di luar kantor KUA sebagai pungutan non-pajak. Terdapat perbedaan detail mengenai ukuran dan jumlah pas foto yang dibutuhkan, di mana Kepala KUA menyebutkan dua ukuran (3x3 dan 4x6), sementara Penghulu menyatakan saat ini hanya menggunakan satu ukuran (2x3). Baik Kepala KUA maupun Penghulu menekankan pentingnya surat keterangan sehat sebagai upaya mewujudkan pernikahan dan generasi yang berkualitas.

2. Pelaksanaan pembekalan calon pengantin sebagai syarat kelengkapan persyaratan pencatatan pernikahan di KUA Sukun

Pembekalan calon pengantin, atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin), merupakan tahapan memecahkan masalah dan sering kali menjadi persyaratan wajib dalam proses pencatatan pernikahan di KUA. Program ini dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mendasar terkait aspek hukum pernikahan, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi efektif, serta nilai-nilai agama. Peran dalam Bimwin dianggap penting untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, sehingga menjadi bagian dari kelengkapan persyaratan administrasi pernikahan di KUA.

Pelaksanaan pembekalan calon pengantin sebagai syarat kelengkapan persyaratan pencatatan pernikahan di KUA Sukun yaitu dengan mendaftarkan diri ke KUA mengikuti bimbingan perkawinan setelah itu diajak berdialog diberikan tes dan diberikan materi materi tentang bimbingan pranikah. Tekadang dari pihak KUA mengundang pihak kapolsek atau koramil untuk mengetahui stabilitas keamanaan negara.

Berikut adalah tabel fokus penelitian dan temuan penelitian yang didapat dilakukan pada tanggal 14-15 Mei 2025 di KUA Kecamatan Sukun. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama di lapangan peneliti menemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

NO	FOKUS PENELITIAN	TEMUAN PENELITIAN
1.	Perencanaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukun terkait dengan calon pengantin.	Perencanan pernikahan di KUA Sukun diawali pengumpulan dokumen (kk,ktp,surat sehat dan lain-lain) selanjutnya melaksanakan pembinaan setelah pembinaan melaksanakan nikah.
2.	Pelaksanaan pembekalan calon pengantin sebagai syarat kelengkapan persyaratan pencatatan pernikahan diKUA Sukun.	Prosedur pelaksanaan pembekalan pranikah di KUA Sukun mengacu pada PMA No. 30 Tahun 2024 yang mewajibkan bimbingan perkawinan setelah pengumpulan dokumen.
3.	kendala serta solusi untuk pembekalan calon pengantin yang dilakukan oleh Kua Kecamatan Sukun.	Kendala pembekalan calon pengantin di KUA Sukun yaitu ketidakhadiran calon pengantin dikarenakan kerja atau diluar kota. Solusinya melakukan pembinaan secara langsung kepada calon pengantin setelah melalui proses pemeriksaan dokumen.

3. Kendala serta solusi untuk pembekalan calon pengantin yang dilakukan oleh Kua Kecamatan Sukun

KUA Kecamatan Sukun menghadapi kendala dalam pembekalan calon pengantin, seperti masalah dana, fasilitas kurang memadai, minat masyarakat

rendah, dan jadwal yang bentrok dengan pekerjaan. Sebagai solusinya, KUA Sukun kini memberikan pembekalan singkat secara langsung setelah pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Pendekatan ini terbukti meningkatkan partisipasi, terutama dari calon pengantin laki-laki, sehingga pembekalan tetap efisien dan efektif tanpa mengganggu aktivitas mereka.

a. faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah

Keberhasilan pembimbingan pra-nikah sangat bergantung pada dua kategori faktor utama: faktor internal dari individu yang membimbing, dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan bimbingan. Faktor internal mencakup kondisi fisikah dan spiritualah calon pengantin, termasuk potensi terpendam yang mereka miliki. Hal ini meliputi kecerdasan atau kemampuan mereka dalam menerima nasihat , perhatian konseli terhadap konselor selama bimbingan berlangsung, kesiapan mental , dan kondisi fisik yang sehat . Di sisi lain, faktor eksternal meliputi kualitas bahan atau materi yang disampaikan , situasi dan kondisi lingkungan fisik di mana bimbingan dilakukan, situasi dan kondisi lingkungan sosial yang mendukung, serta cara bimbingan yang diterapkan oleh konselor. Jika semua faktor ini dapat terpenuhi dan saling mendukung, kegiatan pembimbingan akan mencapai keberhasilan. Sebaliknya, jika ada faktor-faktor yang tidak mendukung, hal tersebut akan menghambat pemberdayaan konservasi, sehingga mengurangi efektivitasnya.(adar BakhshBaloch 2017) Kendala Implementasi Bimwin DJ.II/ 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang ada di KUA diantaranya:

1) Dana

Bimwin bisa terlaksana ketika anggaran dari Pemerintah turun, dan apabila anggarannya belum cair maka BIMWIN pun tidak akan terealisasi. Hal ini merupakan masalah utama dari berjalan atau tidaknya Bimwin, karena biaya tersebut menyangkut berbagai aspek kegiatan Bimwin mulai dari administrasi, silabus materi, konsumsi, dan akomodasi pemateri dan lain–lain.

2) Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi suatu komponen yang penting, dikarenakan tidak memungkinkan kegiatan kursus calon pengantin diselenggarakan di KUA, karena mengingat kondisi kantor yang kecil dengan beberapa ruang yang salah satunya digunakan sebagai ruang kepala, ruang staf, ruang pelaksanaan nikah dan

lain– lain. Hal ini menyebabkan kegiatan Bimwin calon pengantin tidak dapat diselenggarakan di KUA Kecamatan Sukun.

3) Keinginan masyarakat rendah

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat ini adalah kurangnya kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pra nikah, serta keterbatasan waktu dan sosialisasi dari pihak KUA. Meskipun KUA Kecamatan Sukun telah melaksanakan program bimbingan nikah dengan menghadirkan narasumber ahli yang membahas berbagai aspek kehidupan rumah tangga, namun partisipasi masyarakat masih belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan di berbagai daerah lain yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam bimbingan pra nikah menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi agar calon pengantin memperoleh bekal yang cukup sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

4) Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Bimwin ini menjadi kendala tersendiri bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. Mayoritas peserta Bimwin memiliki aktivitas atau pekerjaan yang terikat. Sehingga ketika kegiatan Bimwin diselenggarakan tidak jarang peserta calon pengantin memilih untuk tidak menghadiri kegiatan Bimwin tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan Bimwin. Karena kegiatan tersebut juga belum berakibat pada persyaratan pendaftaran perkawinan. (Lailatul Musyafa'ah et al. 2021)

5) Solusi pelaksankan pembekalan di KUA Sukun

KUA awalnya mengadakan bimbingan nikah dengan mengundang calon pengantin secara bersama-sama dalam satu kelas gabungan. Namun, metode ini mengatasi kendala karena banyak calon pengantin laki-laki yang tidak bisa hadir akibat kesulitan izin kerja dua kali, sehingga seringkali hanya calon pengantin perempuan yang hadir. Untuk mengatasi hal tersebut, KUA bereksperimen dengan metode pelatihan langsung setelah pemeriksaan kesehatan dan administrasi di penghulu. Setelah pemeriksaan selesai, pengantin calon muda langsung mengikuti pelatihan selama sekitar 10 menit, pendekatan ini berhasil meningkatkan kehadiran dan partisipasi calon pengantin, terutama laki-laki, sehingga proses pembekalan menjadi lebih efisien dan efektif tanpa mengganggu aktivitas kerja mereka. Solusi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan

dari surat edaran No 02 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang menjelaskan , tujuan pembeklan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Untuk mengatasi kendala ini, KUA Sukun telah menerapkan solusi dengan mengubah metode bimbingan. Awalnya, KUA mengadakan bimbingan klasikal, namun banyak kesulitan calon pengantin laki-laki hadir karena masalah izin kerja. Oleh karena itu, KUA Sukun beralih ke pendekatan pembekalan langsung setelah pemeriksaan kesehatan dan administrasi . Dengan metode ini, calon pengantin muda, terutama laki-laki, dapat langsung mengikuti pembekalan singkat sekitar 10 menit tanpa mengganggu jadwal kerja mereka. Pendekatan ini terbukti berhasil meningkatkan kehadiran dan partisipasi, sejalan dengan tujuan Surat Edaran No. 02 Tahun 2024 untuk membekali calon pengantin agar memiliki pengetahuan dalam perencanaan keluarga berkualitas dan mengelola dinamika rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

D. Simpulan

Hasil analisis peneliti yang telah dilakukan mengenai efektifitas pelaksanaan pembekalan calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Sukun). Peneliti menyimpulkan :

a. KUA Kecamatan Sukun memiliki sistem perencanaan pernikahan yang komprehensif, mencakup persyaratan administrasi (surat pengantar RT/RW, formulir N1–N4, fotokopi identitas, pas foto) dan pemeriksaan dokumen oleh petugas KUA. Biaya pernikahan mengikuti Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015: gratis jika akad nikah di kantor KUA saat jam kerja, dan Rp600.000 jika di luar kantor/jam kerja, sebagai PNBP resmi.
b. Pembekalan calon pengantin (BIMWIN) wajib dilakukan sesuai aturan, menargetkan pengantin muda (1–30 tahun) dan menjadi syarat pencatatan nikah. Materi pembekalan meliputi kesiapan mental dan pengetahuan rumah tangga untuk mencegah perceraian.
c. Kendala utama meliputi keterbatasan sarana, rendahnya minat, dan bentroknya jadwal calon pengantin. Sebagai solusi, KUA menerapkan pembekalan singkat sekitar 10 menit setelah pemeriksaan kesehatan dan administrasi, sehingga lebih praktis dan meningkatkan partisipasi.

Daftar Rujukan

Adar Bakhshbaloch, Q. 2017. Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah {Bibliography}Di BP4 Kua Gedungtengen Yogyakarta Skripsi

Aminah, Siti. 2022. "Efektivitas Bimbingan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di Kecamatan Dukun." Al Maqashidi 5 (1): 19–28.

Azhari, Novi Hadianti, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." Indonesian Journal of Adult and Community Education 2 (2): 19–27. https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877.

Bursal, Juniar. 2021. "Efektivitas Bimbingan Pranikah Kua Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Parepare." Pharmacognosy Magazine 75 (17).

Fitri, Melia. 2014. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi I.

Hakim, Muhammad Lutfi. 2013. "Pra-Nikah : Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)." Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, 141–54.

Hasibuan, Panarengan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, and Sri Ulfa Rahayu. 2023. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method." ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (1): 8–15.

Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, Kalangi S. Johnny. 2018. "Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7." Jurnal Acta Diurna 7 (2): 1–5.

Iskandar, M Ridho. 2018. "Bimbingan Dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 , Indonesia A . Pendahuluan Pernikahan Dalam Pandangan Islam Adalah." Bimbingan Dan Konseling Islam 2 (1): 63–78.

Jufri. 2021. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap." Tesis IAIN Parepare.

Kementerian Agama RI. 2024. "Surat Edaran Bimwin."

KUA Sukun. n.d. "Persyaratan Rekomendasi Nikah Register Nikah Kecamatan/Kelurahan Merupakan Tempat Mencatat Permohonan Ijin Nikah

Yang Dianjurkan Oleh Warga Masyarakat Di Wilayahnya Untuk Diteruskan Kepada Pejabat Instansi Yang Berwenang." https://kecsukun.malangkota.go.id/rekomendasi-nikah/.

Lailatul Musyafa'ah, Nur, Moch. Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, and Lianal Khuluq. 2021. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." Mahakim: Journal of Islamic Family Law 5 (2): 83–99. https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135.

Mustika, Dian. 2011. "pencatatan perkawinan dalam undang-undang hukum keluarga di dunia islam oleh dian mustika, s.h.i., m.a. 1." inovatif 04 (vol. 4 no. 5 (2011): inovatif): 52–64.

Rizky Fadilla, Annisa, and Putri Ayu Wulandari. 2023. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan." Mitita Jurnal Penelitian 1 (No 3): 34–46.

Sari, Nur. 2018. "Nur Indah Sari."

Suci Eliyawati. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar)," 12–26.

To, Pre-marriage Supplies, Improve Communication, Readiness For, Marriage-aged Teens, Siti Rohimah, Riski Kristianto Pambudi, Program Studi, and Pendidikan Agama. n.d. "Pembekalan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan," 19–25.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. No Hukum Perkawinan Di Indonesia Sustainability (Switzerland). Vol. 11. _Sistem_pembetungan_terpusat_strategi_melestari.

Widiyanto, Hari. 2020. "konsep pernikahan dalam islam (studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)." Jurnal Islam Nusantara 4 (1): 103. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213.